



**REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM
SESUAI SAK ETAP
(Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)**

SKRIPSI

Oleh:

**YUDHA PRASETIAWAN
NIM 110810301059**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM
SESUAI SAK ETAP
(Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**YUDHA PRASETIAWAN
NIM 110810301059**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. dan dengan mengucap rasa syukur yang tiada henti, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. kedua orang tuaku, Sugianto dan Timah, yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungannya, mulai dari doa, nasihat, materi, dan semua yang mereka berikan dengan tulus di setiap langkahku;
2. adik-adikku yang sangat aku cintai, Bayu Yulio Alfianto dan Fera Kartika Mawardani, mereka adalah semangatku untuk sukses dan mampu memberikanku motivasi untuk bisa membahagiakan mereka;
3. para pendidik, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang senantiasa memberiku ilmu yang bermanfaat dengan penuh rasa ikhlas;
4. almamaterku tercinta yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Jember tempat dimana aku menimba ilmu dan pengalaman sebagai bekal di kehidupan yang lebih tinggi; dan
5. untuk semua teman-temanku tercinta yang selalu mengisi hari-hariku dengan canda dan tawa mereka.

MOTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubahnya”.

(QS. Ar-Ra’du: 11)

“Apa yang telah berlalu tidak akan kembali, masa depan juga sesuatu yang misteri.

Kehidupan sebenarnya adalah waktu di mana Anda berada sekarang”.

(Dr. Ibrahim Fiqhy dalam bukunya Agar Gelisah Bernilai Ibadah)

“...bergesalah kawan sambut masa depan tetap berpegang tangan saling berpelukan, berikan senyuman sebuah perpisahan, tenanglah sahabat kita untuk selamanya”.

(Bondan and Fade2Black dalam lagu Kita Selamanya)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Prasetiawan

NIM : 110810301059

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2015

Yang menyatakan,

Yudha Prasetiawan
NIM. 110810301059

SKRIPSI

REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM

SESUAI SAK ETAP

(Studi pada KUD Sumber Alam Ambulu)

Oleh

Yudha Prasetiawan

110810301059

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UNIT
SIMPAN PINJAM SESUAI SAK ETAP (Studi Kasus
pada KUD Sumber Alam Ambulu)

Nama Mahasiswa : Yudha Prasetiawan

N I M : 110810301059

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 17 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Alwan S. Kustono, M.Si., Ak.

Wahyu Agus W., S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197204162001121001

NIP. 198308102006041001

Ketua Jurusan
Akuntansi,

Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak.

NIP. 197204162001121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

**REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM
SESUAI SAK ETAP
(Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yudha Prasetiawan

NIM : 110810301059

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 November 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Hj. Siti Maria W., M.Si., Ak. (.....)
NIP. 19660805 199201 2 001

Sekretaris : Kartika, S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP. 19820207 200812 2 002

Anggota : Drs. Wasito, M.Si., Ak. (.....)
NIP. 19600103 199103 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

Yudha Prasetiawan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek sebagai suatu kasus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif dengan empat kriteria keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepasatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan belum sesuai SAK ETAP karena hanya menyajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca serta tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus direkonstruksi agar penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan SAK ETAP, yaitu terdiri atas neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci: rekonstruksi, SAK ETAP, laporan keuangan

Yudha Prasetiawan

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to reconstruct financial statement that appropriate with International Financial Reporting Standart for Small Medium Enterprise at Saving and Loan Unit KUD Sumber Alam Ambulu. This study be included in qualitative research that use case study approach. Case study is the approach that focus on object as a case intensively. Data collection method in this approach are interview and documentation methods. This study also use data analysis technique of qualitative research with four standards of data validity. Those are credibility, transferability, dependability, and confirmability. The result show that the financial statements of Saving and Loan Unit are not suitable with IFRS for SMEs. The condition caused because this unit are not present statement of changes in equity, cash flow, and notes to the financial statement. Those financial must be reconstructed the preparation and presentation thus becoming fit with IFRS for SMEs because the complete financial statements are consists of balance sheet, income statement, change in equity statement, cash flow, and the notes to the financial statement.

Key words: *reconstruction, IFRS for SMEs, financial statement*

RINGKASAN

Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu); Yudha Prasetiawan, 110810301059; 2015: 82 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dipercepatnya pelaksanaan MEA di tahun 2015, pemerintah mau tidak mau harus siap menghadapinya. Peningkatan daya saing dalam pelaksanaan MEA diharapkan datang dari sektor produktif masyarakat yaitu melalui usaha koperasi dan UMKM. Usaha yang harus dilakukan pemerintah tersebut adalah adanya dukungan permodalan usaha dengan persyaratan yang lebih mudah, fasilitas sertifikasi produk, dan peningkatan wawasan terhadap peluang yang bisa diraih tak terkecuali pada sektor usaha koperasi. Selain hal di atas, peningkatan kualitas koperasi juga diharapkan muncul dari adanya peningkatan kualitas manajemen usahanya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Hal tersebut terlebih lagi terjadi pada aspek pelaporan keuangan karena laporan keuangan dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem pengawasan terhadap pengelolaan manajemen. Namun, pelaksanaan terhadap sistem pelaporan keuangan koperasi yang sesuai standar masih belum maksimal, salah satunya yang terjadi di USP KUD Sumber Alam. Sehingga, dalam hal ini diperlukan rekonstruksi terhadap laporan keuangan koperasi yang sesuai standar yaitu SAK ETAP. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui laporan keuangan yang sudah disusun USP KUD Sumber Alam dan kemudian menyajikannya kembali sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan

penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek sebagai suatu kasus. Objek penelitian yang dipilih adalah Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data berupa wawancara serta dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan peneliti untuk mencapai kriteria tersebut terdiri atas teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, dan triangulasi.

Tahapan pada penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi laporan keuangan yang sudah disajikan oleh USP KUD Sumber Alam. Dari proses identifikasi tersebut diperoleh hasil bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh USP hanya laporan perhitungan sisa hasil usaha dan neraca saja. Dari kedua laporan tersebut masih terdapat penyusunan dan penyajian pos-pos laporan keuangan yang belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP. Ketidaksesuaian tersebut meliputi: kebijakan mengenai cadangan kerugian piutang yang masih menggunakan metode penghapusan langsung, terdapat beberapa pos-pos yang belum disajikan di neraca, simpanan pokok anggota diakui sebagai pendapatan bukan sebagai ekuitas, tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus direkonstruksi agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bagi koperasi, standar akuntansi yang berlaku adalah SAK ETAP. Dengan demikian, laporan keuangan USP KUD Sumber Alam disajikan kembali sesuai dengan kaidah SAK ETAP yaitu berupa laporan keuangan lengkap entitas yang meliputi: neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Utama dan Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Alfi Arif S.E., M.AK., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak Sugianto, Ibu Timah, dan adik-adikku Bayu Yulio Alfianto, serta Fera Kartika Mawardani yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
4. teman-temanku yang selalu memberikan doa dan semangatnya selama ini; serta
5. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi Koperasi	8
2.1.1 Landasan Hukum dan Asas Koperasi	8
2.1.2 Tujuan Koperasi	9
2.1.3 Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi	9
2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi	10
2.2 Koperasi Simpan Pinjam	11

2.3	Standar Akuntansi Koperasi	12
2.4	Gambaran Umum SAK ETAP	13
2.4.1	Ruang Lingkup	13
2.4.2	Tujuan Laporan Keuangan	14
2.4.3	Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan	14
2.4.4	Kebijakan Akuntansi Sesuai SAK ETAP	17
2.4.5	Laporan Keuangan Lengkap Sesuai SAK ETAP	20
2.5	Penelitian Terdahulu	24
BAB 3.	METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1	Metode Riset Kualitatif yang Digunakan	26
3.2	Lokasi Objek Penelitian	26
3.3	Waktu Penelitian	27
3.4	Sumber Data	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	28
3.6	Teknik Analisis Data	28
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
3.8	Kerangka Pemecahan Masalah	31
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.1.1	Sejarah Berdirinya KUD Sumber Alam	32
4.1.2	Struktur Organisasi KUD Sumber Alam	33
4.1.3	Kegiatan Usaha Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam	34
4.2	Laporan Keuangan USP KUD Sumber Alam	37
4.2.1	Neraca USP KUD Sumber Alam	38
4.2.2	Laporan Perhitungan SHU USP KUD Sumber Alam	42
4.2.3	Penjelasan Laporan Keuangan USP KUD Sumber Alam	44
4.3	Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam	50
4.3.1	Pos-pos Neraca	51
4.3.2	Pos-pos Laporan Perhitungan SHU	61

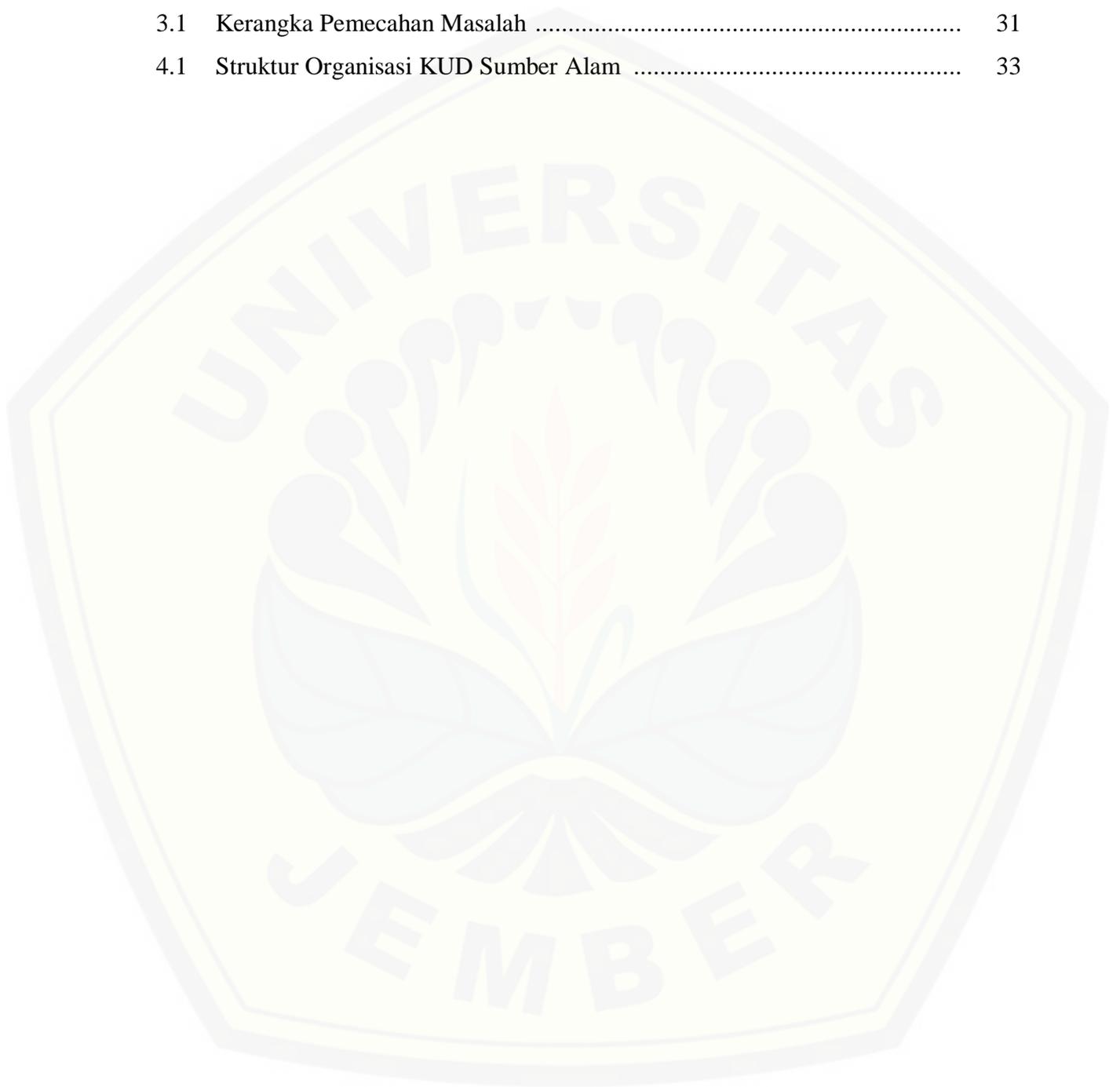
4.4	Laporan Keuangan USP KUD Sumber Alam Sesuai SAK	
	ETAP	66
4.4.1	Neraca USP KUD Sumber Alam	66
4.4.2	Laporan Perhitungan SHU USP KUD Sumber Alam	68
4.4.3	Laporan Perubahan Ekuitas USP KUD Sumber Alam	69
4.4.4	Laporan Arus Kas USP KUD Sumber Alam	69
4.4.5	Catatan Atas Laporan Keuangan	70
BAB 5.	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan	75
5.3	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Laporan Neraca USP bulan September 2015	39
4.2 Penjelasan Neraca USP bulan September 2015	40
4.3 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha USP KUD Sumber Alam	42
4.4 Laporan Kas Opname USP bulan September 2015	44
4.5 Rekapitulasi Piutang PH	46
4.6 Rincian Kas dan Bank	52
4.7 Rincian Piutang dan Piutang Merah	53
4.8 Jurnal Koreksi Piutang Usaha	53
4.9 Analisis Persentase Penyisihan Piutang Ragu-ragu	54
4.10 Perhitungan Penyisihan Piutang Ragu-ragu	55
4.11 Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Ragu-ragu	55
4.12 Penyusutan Aset Tetap	59
4.13 Rincian Liabilitas USP per 30 September 2015	60
4.14 Jurnal Koreksi Simpanan Anggota	64
4.15 Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Ragu-ragu	66
4.16 Neraca USP KUD Sumber Alam	67
4.17 Laporan Perhitungan SHU USP KUD Sumber Alam	68
4.18 Laporan Perubahan Ekuitas USP KUD Sumber Alam	69
4.19 Laporan Arus Kas USP KUD Sumber Alam	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	31
4.1 Struktur Organisasi KUD Sumber Alam	33



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keberadaan koperasi di Indonesia diharapkan mampu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, pasal 1 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sekurang-kurangnya terdiri atas dua puluh orang. Sedangkan, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi sekurang-kurangnya tiga koperasi. Koperasi primer maupun sekunder keanggotannya bersifat sukarela dan terbuka dengan sistem pengelolaannya yang demokratis.

Pasal enam belas menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi yang dimaksud, antara lain koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan, sedangkan koperasi produsen

menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota serta non anggota. Koperasi jasa menyelenggarakan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Jenis koperasi yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam yang tujuannya menjalankan usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan mewujudkan masyarakat yang mandiri dari segi ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor produktifnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usahanya, misalnya melalui bantuan modal, manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya. Koperasi bersama dengan masyarakat berusaha untuk mewujudkan peningkatan perekonomian nasional, memperkuat perekonomian rakyat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Dewasa ini, pemerintah harus terus melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakatnya. Peningkatan yang signifikan diharapkan datang dari sektor produksi masyarakat. Karena sampai saat ini, kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia masih ditopang oleh impor dari negara lain sebesar 40% (Hasan, 2013). Dengan jumlah penduduk mencapai 246,5 juta jiwa, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan pasar bagi produsen dari luar negeri melalui kegiatan impor produk. Hal ini tentunya akan semakin memperbesar pengeluaran masyarakat khususnya dan meningkatkan pengeluaran nasional secara umum. Terlebih lagi di tahun 2015 ini, Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN sudah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang artinya Indonesia masuk ke dalam era perdagangan bebas ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN terbentuk tahun 2003 yang disepakati dan mulai berlaku tahun 2020. Namun dalam pertemuan di Singapura tahun 2007, MEA dipercepat dan mulai berlaku paling lambat tahun 2015. Terbentuknya

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pasar bebas dari basis produksi tunggal, menciptakan kawasan berdaya saing tinggi, menciptakan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan menciptakan integrasi dengan perekonomian dunia (Sambodo, 2015). Berlakunya MEA mengartikan bahwa di dalamnya akan ada arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja antar negara ASEAN.

Dipercepatnya pelaksanaan MEA di tahun 2015, pemerintah mau tidak mau harus siap menghadapinya. Untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN, usaha yang harus dilakukan pemerintah adalah merancang kemudahan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, dan kecil untuk menciptakan iklim yang kondusif. Kemudahan yang dimaksud adalah adanya dukungan permodalan usaha dengan persyaratan yang lebih mudah. Selain dari aspek permodalan, pemerintah juga akan memfasilitasi koperasi maupun UMKM untuk mendapat sertifikasi produk yang dihasilkan mereka. Sertifikasi tersebut akan mempermudah produk koperasi dan UMKM masuk ke pasar tunggal ASEAN. Namun, hal yang tidak kalah penting yang harus dimiliki koperasi dan UMKM menuju MEA adalah peningkatan wawasan terhadap peluang yang bisa diraih. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan efisiensi proses produksi dan manajemen usaha (Muharram, 2014).

Dari segi pelaku usaha terutama koperasi, penguatan dan peningkatan kualitas harus terus dilakukan oleh koperasi untuk menjawab adanya persaingan yang muncul diantara negara anggota ASEAN. Efisiensi proses produksi menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian penting saat ini. Dengan pencapaian efisiensi proses produksi tersebut, produk-produk yang dihasilkan koperasi akan memiliki kualitas yang bagus dan memiliki daya saing dengan produk impor dari negara anggota ASEAN. Selain itu, efisiensi produksi juga akan menurunkan biaya atas suatu produk yang dihasilkan. Pencapaian efisiensi produksi yang mampu menurunkan biaya produksi juga akan berdampak pada harga produk yang mampu bersaing tanpa mengurangi tingkat kualitas produk tersebut.

Peningkatan kualitas koperasi juga diharapkan muncul dari adanya peningkatan kualitas manajemen usahanya. Manajemen usaha secara umum

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan adanya perencanaan yang baik, koperasi mampu merumuskan strategi-strategi dalam pelaksanaan usahanya. Tingkat kreativitas setiap pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk membaca setiap peluang yang mungkin bisa dicapai. Setelah rumusan dan rencana strategi terbentuk, proses pelaksanaan dapat dilakukan. Dengan membentuk organisasi yang baik, koperasi dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Melalui organisasi yang terstruktur, koperasi akan mampu berjalan sesuai strategi yang ditentukan guna mencapai keuntungan yang optimal, sehingga koperasi akan mampu bertahan dalam persaingan di pasar tunggal ASEAN.

Untuk mendukung proses manajemen tersebut di atas, koperasi memerlukan tahap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan oleh suatu organisasi karena dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (IAI, 2009:1). Laporan keuangan dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem pengawasan terhadap pengelolaan manajemen. Melalui laporan keuangan, pihak yang berkepentingan juga dapat mengevaluasi kinerja keuangan suatu manajemen.

Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan koperasi mulai disesuaikan dengan laporan keuangan IFRS pada tahun 2012. Penyesuaian tersebut diawali dengan penerbitan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No. 8 pada 8 April 2011 dan secara resmi PSAK Nomor 27 untuk Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi (Heriyanto, 2012). Sebagai gantinya, Kementerian Koperasi dan UKM memberlakukan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman akuntansi yang baru bagi koperasi maupun UKM. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. SAK ETAP sebagian besar menggunakan konsep

biaya historis, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Mardiasmo, dalam IAI, 2013).

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2009:17–18).

Meskipun pedoman akuntansi koperasi sudah diatur di dalam standar, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh Koperasi Unit Desa Sumber Alam yang menyajikan laporan keuangannya tidak lengkap. Koperasi yang terletak di desa Pontang kecamatan Ambulu ini tergolong cukup maju dan memiliki beberapa unit bisnis, diantaranya: unit simpan pinjam, unit pengadaan pangan, unit toko, unit rekening listrik, serta unit distributor pupuk Petrokimia. Namun dari segi penyusunan dan penyajian laporan keuangan, KUD ini masih belum memenuhi kaidah-kaidah standar.

Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan belum memenuhi kaidah standar tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan serta informasi yang disajikan tidak bisa diandalkan. Dampak lainnya dari permasalahan tersebut juga akan menyebabkan terbatasnya akses KUD terhadap pendanaan dari perbankan. Selain itu, kementerian terkait melalui surat edaran deputy bidang kelembagaan juga telah mendorong kepada seluruh koperasi di Indonesia untuk memenuhi standar akuntansi yang baru yang diperuntukkan bagi koperasi yaitu SAK ETAP. Namun, penerapan tersebut juga disesuaikan dengan landasan hukum koperasi yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini berfokus pada perbaikan sistem pelaporan yang ada di unit simpan pinjam. Hal utama yang menjadi pertimbangan untuk merekonstruksi laporan keuangan di unit simpan pinjam karena unit tersebutlah yang memiliki

aset terbesar di KUD. Dengan aset yang besar, risiko yang terdapat di unit ini juga menjadi besar. Adanya laporan keuangan yang tidak lengkap akan meningkatkan risiko kecurangan di dalam proses pertanggungjawabannya. Agar bisa diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan serta kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi (IAI, 2009: 4). Dengan demikian, penelitian ini berjudul “**Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP (Studi Kasus pada KUD Sumber Alam Ambulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan yang sudah disusun oleh Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu?
2. Bagaimana bentuk rekonstruksi laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar sesuai dengan ruang lingkup masalah yang hendak diteliti, maka penelitian ini dibatasi hanya pada dilakukannya penyusunan dan penyajian kembali laporan keuangan lengkap Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis bentuk penyajian laporan keuangan yang sudah disusun oleh Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu.

2. Untuk menyajikan bentuk rekonstruksi laporan keuangan Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Pengurus KUD

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengurus Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam Ambulu sebagai pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan setiap periode sesuai standar yang berlaku yaitu SAK ETAP. Dengan laporan keuangan lengkap, informasi yang tersedia dapat diandalkan oleh pengurus KUD dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Anggota KUD Sumber Alam

Hasil penelitian ini dapat digunakan anggota KUD Sumber Alam sebagai penilaian kinerja pengurus yang menjabat. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan anggota sebagai bentuk pengawasan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pengelola.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan penulis tentang penerapan SAK ETAP pada usaha koperasi dan menambah kemampuan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan minat penelitian di bidang yang sama dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta menambah sumber literatur dalam bidang akuntansi bagi pelaku usaha koperasi dan UKM.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Awal mula terbentuknya koperasi karena adanya jiwa dan semangat gotong royong yang telah hidup di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha koperasi memiliki tujuan utama, yaitu mengembangkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya (Sumarni dan Soeprihanto, 2010:54).

Definisi yang dijelaskan di atas memiliki makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya, sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi melalui rapat anggota tahunan (Ulfah, 2013). Hal tersebut berbeda dengan badan usaha bukan koperasi yang bergantung kepada pemilik modal dalam pengambilan keputusan dan bukan bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya.

2.1.1 Landasan Hukum dan Asas Koperasi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-undang yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan unit simpan pinjam koperasi diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1995.

Asas kekeluargaan yang menjadi landasan pelaksanaan koperasi mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut, semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Ulfah, 2013). Hal ini terbukti bahwa kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah rapat anggota.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan, PP Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana kemudian menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, serta anggotanya. Dengan demikian, tujuan utama koperasi adalah memberikan manfaat yang optimal kepada anggotanya dibandingkan pencapaian laba semata, namun juga harus diusahakan agar koperasi tidak mengalami kerugian.

2.1.3 Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 Pasal 4 menjelaskan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

Sedangkan, Pasal 5 menjelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi antara lain sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut.

1. Pendidikan perkoperasian.
2. Kerja sama antar koperasi.

2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 Pasal 15 menjelaskan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan bentuk koperasi yang anggotanya adalah orang-seorang. Sedangkan, koperasi sekunder merupakan koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi. Meskipun demikian, keanggotaan diantara dua bentuk koperasi tersebut tetap sama, yaitu bersifat suka rela dan terbuka.

Pasal berikutnya menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:57), jenis-jenis koperasi diantaranya: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan, koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota serta non anggota, koperasi jasa menyelenggarakan usaha pelayanan jasa non

simpan pinjam, dan koperasi simpan pinjam yang menjalankan usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana kemudian menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, serta anggotanya. Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja. Sedangkan, unit simpan pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa produk dari unit simpan pinjam (USP) secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan serta simpanan koperasi berjangka.

2. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi bersangkutan.

3. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

4. Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.3 Standar Akuntansi Koperasi

Standar akuntansi yang berlaku untuk koperasi pada awalnya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 27. PSAK 27 tersebut mengatur sistem akuntansi atas transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi spesifik pada koperasi, dan penyajian laporan keuangan (Ulfah, 2013). Namun, PSAK 27 yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian oleh IAI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencabutan PSAK 27 tersebut dilakukan dengan menerbitkan *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (ED PPSAK) Nomor 8 pada tanggal 23 Oktober 2010 oleh DSAK dan dilanjutkan dengan penerbitan PPSAK Nomor 8 pada tanggal 8 April 2011. Dengan demikian, peraturan tersebut berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Lebih lanjut menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010), dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27 tentang akuntansi koperasi adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. Transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 27 (akuntansi koperasi) mengacu SAK lain yang relevan, yaitu SAK ETAP. Dengan dikeluarkannya pernyataan ini, entitas menerapkan SAK lain terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27 dan pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Menanggapi hal tersebut, sejak tanggal 1 Januari 2012 standar akuntansi keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan surat edaran deputy bidang kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.I/XII/2012. Sejak saat itu pencabutan PSAK 27 dan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) mulai disampaikan ke seluruh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM provinsi. Untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas pelaksanaan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 4/2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19.5/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (Heriyanto, 2012).

2.4 Gambaran Umum Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun standar akuntansi keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menyadari bahwa dalam upaya pengembangan koperasi dan UKM terdapat salah satu kendala utama yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Tidak tersedianya laporan keuangan tersebut menyebabkan terbatasnya akses koperasi dan UKM terhadap pendanaan dari perbankan. Sehingga untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan SAK ETAP pada tanggal 17 Juli 2009 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2011.

2.4.1 Ruang Lingkup

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana serta investasi.

Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009:2).

2.4.3 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2–5) menjelaskan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias serta penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi, realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk mengingatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat, penjelasan peristiwa

keadaan tersebut, dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan serta kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi serta peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut, dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan

informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.4.4 Kebijakan Akuntansi Sesuai SAK ETAP

Dalam menyusun laporan keuangan, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta penyajian harus selalu digunakan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009:36) menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangannya.

1. Pengakuan

Pada saat menyusun laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2009:12–13) mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi serta kriteria pengakuan sebagai berikut.

a. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan,

sehingga transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan "*matching concept*".

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum dan dapat digunakan berdasarkan SAK ETAP adalah sebagai berikut.

- a. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk menukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

3. Penyajian

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas serta harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian wajar tersebut mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi serta kriteria pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP (IAI, 2009:14).

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP juga membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi atau menghentikan operasi. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut (IAI, 2009:15).

SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus kontinyu serta konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Jika terjadi perubahan penyajian dan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut

jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi (IAI, 2009:16).

Terakhir dalam menyajikan laporan keuangan, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat memengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu (IAI, 2009:17).

2.4.5 Laporan Keuangan Lengkap Sesuai SAK ETAP

Laporan keuangan lengkap suatu entitas berdasarkan SAK ETAP, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode. Informasi yang disajikan neraca minimal mencakup pos-pos, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha serta piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset serta kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Format atau urutan penyajian pos-pos tersebut tidak diatur dalam standar.

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal serta lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

- a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- b. dimiliki untuk diperdagangkan;

- c. diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d. berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Sebaliknya, entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar, jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diasumsikan selama lebih dari dua belas bulan.

Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban panjang. Kecuali, entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- a. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- b. dimiliki untuk diperdagangkan;
- c. kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- d. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya dua belas setelah akhir periode pelaporan (IAI, 2009:20).

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos, yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu, entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009:23–24).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, jumlah investasi, jumlah dividen, serta distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (IAI, 2009:27).

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode. Yang dimaksud setara kas, yaitu investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek serta bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas-aktivitas sebagai berikut.

a. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut.

- Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
- Penerimaan kas dari royalti, *fee*, komisi, dan pendapatan lain.
- Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
- Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, serta kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan (IAI, 2009:28–29).

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut.

- Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
- Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.

- Pembayaran atau penerimaan kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (bukan efek yang diklasifikasikan untuk diperdagangkan).
- Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain atau penerimaan kas dari pembayaran kembali atas pinjaman tersebut (IAI, 2009:29–30).

c. Aktivitas Pendanaan

Berikut ini contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu sebagai berikut.

- Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain.
- Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas.
- Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- Pelunasan pinjaman.
- Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (IAI, 2009:30).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI (2009, 34–35), catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
- b. mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c. memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan SAK ETAP terhadap badan usaha koperasi dan UKM adalah sebagai berikut.

1. Ulfah (2013) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi X”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara penerapan SAK ETAP yang dilakukan oleh Koperasi X sekaligus melakukan review aspek-aspek yang dinilai untuk melihat ketepatan penerapan SAK ETAP pada Koperasi X. Peneliti juga melakukan pemeriksaan atas kesesuaian terhadap perlakuan akuntansi yang berlaku, khususnya dalam bentuk penyajian laporan keuangan dengan teori yang ada. Hasil penelitian tentang perlakuan akuntansi, khususnya dalam penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Koperasi X, yaitu telah sesuai dengan SAK ETAP.
2. Yuliana (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UD. Andy Putra”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan laba rugi dan neraca untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 belum sesuai dengan kaidah penyajian laporan laba

rugi dan neraca menurut SAK ETAP. Ketidaksesuaian tersebut meliputi kesalahan pengukuran jumlah pendapatan penjualan dan pembelian barang dagangan, pengklasifikasian kelompok akun, serta adanya kelompok akun yang belum disajikan. Sehingga, temuan tersebut menghasilkan penilaian laporan keuangan yang *understated* (dilaporkan lebih rendah).

3. Arsani dan Putra (2013) melakukan penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP serta Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan SAK ETAP. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan KSP Duta Sejahtera belum sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan, perlakuan akuntansi beban sudah sesuai dengan SAK ETAP. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan yaitu SHU menurut koperasi lebih rendah daripada SHU menurut perhitungan sesuai SAK ETAP.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Riset Kualitatif yang Digunakan

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah. Peneliti adalah instrumen kunci dan teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi (Sugiyono, 2013:1).

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati fenomena-fenomena yang ada kemudian menjelaskan fenomena tersebut dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dari objek yang diteliti. Penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesis seperti kebanyakan penelitian yang ada.

Setiap metode penelitian di dalam paradigma kualitatif memiliki tipikal dan cara yang berbeda dalam proses serta adaptasi terhadap masalah yang diteliti. Menurut Creswell (dalam Ayu, 2013:30), ada lima macam studi yang sering digunakan oleh para peneliti di dalam penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi, *grounded theory*, *ethnography*, *biography*, dan studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif studi kasus.

Penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Penelitian studi kasus juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek sebagai suatu kasus (Indriantoro dan Supomo, 2011:26). Dengan demikian, metode penelitian kualitatif studi kasus dipilih oleh penulis sebagai metode penelitian ini karena sesuai dengan karakteristik dan masalah yang sedang diteliti yaitu memusatkan pada suatu objek sebagai suatu kasus.

3.2 Lokasi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa Sumber Alam. KUD Sumber Alam ini memiliki beberapa unit kegiatan usaha, salah satunya unit simpan pinjam yang akan menjadi objek penelitian ini. Alamat KUD Sumber Alam berada di Jalan Kotta Blater nomor 10 Desa Pontang, Kecamatan Ambulu Jember.

3.3 Waktu Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, aspek waktu merupakan hal yang penting. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan dalam perkiraan waktu dua bulan atau sampai data dan informasi yang didapat sudah maksimal. Pertimbangan atas perkiraan waktu tersebut diambil atas dasar kemampuan peneliti dalam menyelesaikan tahapan penelitian.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan elemen penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data yang seperti apakah yang akan digunakan peneliti. Di dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2014:104). Data primer juga dapat diartikan sebagai sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2011:146). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan manajer unit simpan pinjam yang diperoleh melalui proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014:104). Data sekunder hanya tinggal dimanfaatkan oleh peneliti sesuai kebutuhannya. Menurut pendapat lain, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis (Indriantoro dan Supomo, 2011:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah

laporan keuangan dan catatan-catatan pendukung yang disajikan oleh Unit Simpan Pinjam KUD Sumber Alam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti survei, observasi, dan dokumentasi (Sanusi, 2014:105). Teknik pengumpulan data berisi beberapa cara dan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei dengan cara menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2011:157). Pada penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan tidak terstruktur dan lebih bersifat personal antara peneliti dengan informan. Hal ini dilakukan agar data yang diberikan informan kepada peneliti merupakan penjelasan yang sebenarnya tanpa adanya kesempatan bagi informan untuk mengolah atau memanipulasinya. Sehingga, data yang diperoleh dari informan dapat dengan akurat diolah peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data yang bisa diolah untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data yang dimaksud bisa berupa laporan keuangan USP KUD Sumber Alam dan catatan-catatan pendukungnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen, dalam Moleong, 2014:248). Secara sederhana, teknik analisis data merupakan cara mendeskripsikan teknik

analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014:115).

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:92), tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data secara objektif dan apa adanya yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, baik melalui kegiatan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam jumlah yang cukup banyak perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci serta diperlukan analisis data melalui reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahap ini dilakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain. Penyajian data pada umumnya berupa teks naratif agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti akan menggunakan media tersebut untuk menyajikan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing and verification*). Penarikan kesimpulan mengartikan bahwa data yang sudah direduksi dan disajikan secara lengkap akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan oleh peneliti. Verifikasi data dapat dilakukan oleh peneliti dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data, seorang peneliti memerlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Moleong (2014:324), ada empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam penelitian kualitatif, antara lain: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Namun, penulis hanya akan menggunakan derajat kepercayaan di dalam penelitian ini karena dianggap sudah mampu memastikan keabsahan setiap data yang didapatkan.

Derajat kepercayaan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan memengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Keabsahan ini berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Keabsahan ini dapat dicapai dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut.

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Teknik ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari serta kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan pengamat (Denzin, dalam Moleong, 2014:330). Pertama berkaitan dengan triangulasi sumber, penulis akan membandingkan